

PEMBENTUKAN CITRA POLITIK DEDIE RACHIM SEBAGAI SOSOK ANTIKORUPSI

(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN WALI KOTA BOGOR 2018)

Dery Fitriadi Ginanjar

Department of Communication, Universitas Sali Al Aitaam

Article Info

Article history:

Received September 19, 2023

Revised November 24, 2023

Accepted December 4, 2023

Kata Kunci:

Kampanye;
Politik;
Citra;
Korupsi;
Pemilihan Umum.

ABSTRAK

Pencitraan politik merupakan bagian dari komunikasi politik, dilakukan secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Kontestan politik, baik dari figur yang dikenal publik sebagai orang bersih maupun orang bermasalah, sama-sama menginginkan citra politik positif untuk memengaruhi pemilih, karena citra telah menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan kampanye. Dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor 2018, terdapat nama Dedie A Rachim yang digandeng petahana Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, bahkan akhirnya pasangan ini menjadi pemenang. Munculnya nama Dedie Rachim di luar prediksi pelaku politik, pengamat politik, dan rakyat Bogor. Dedie Rachim merupakan satu-satunya petinggi setingkat direktur di KPK yang masuk dan berkarir di pemerintahan daerah. Sejak KPK berdiri 2003 silam, belum pernah ada pejabatnya yang memilih mundur untuk terjun ke dunia politik. Dedie memilih mundur sebagai pegawai KPK dengan jabatan akhir Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) dari jauh-jauh hari untuk memberikan contoh kepada pejabat lainnya yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan paradigma konstruktivistik. Penelitian dilakukan di Kota Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data, penerapannya dilakukan dalam tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan citra politik sebagai sosok antikorupsi terhadap Dedie A Rachim pada Pilwalkot Bogor 2018 berjalan baik. Tim pemenangan memanfaatkan latar belakang Dedie Rachim yang berasal dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meraih simpati masyarakat Kota Bogor selama kampanye. Sosok antikorupsi pada Dedie Rachim memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan, meskipun kampanye antikorupsi tidak dilakukan secara simultan. Pembentukan citra politik antikorupsi penting dilakukan karena masyarakat sudah jenuh pada kasus korupsi yang menjerat banyak kepala daerah.

ABSTRACT

Political branding is part of political communication, carried out persuasively to widen the shading of the area of hope between candidates and voters. Political contestants, both from figures known to the public as clean people and problem people alike want a positive political image to influence voters, because image has become the most determining

Keywords:

Campaign;
Political;
Image;
Corruption;
Election.

factor in the success or failure of a campaign journey. In the 2018 Bogor Local Leaders Election, there was the name Dedie A Rachim who was paired with the incumbent Bogor Mayor Bima Arya Sugiarto. The appearance of Dedie A Rachim was beyond the predictions of politicians, political and political observers and the people of Bogor. Dedie Rachim is the higher-ups at the level of the director at the KPK who entered and had a career in regional government. Since the KPK was founded in 2003, no official has ever chosen to resign to enter politics. Dedie chose to resign as a KPK from a long time ago to provide an example to other officials who want to advance in Local Leaders Election. This study used a qualitative method with a case study approach and a constructivist paradigm. The research was conducted in the City of Bogor. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. For data analysis, the application is carried out in three streams of activity, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results showed that the formation of a political image as an anti-corruption figure towards Dedie A Rachim at the 2018 Bogor Local Leaders Election went well. The winning team took advantage of Dedie Rachim's background from the Corruption Eradication Commission (KPK) to win the sympathy of the people of Bogor City during the campaign. The anti-corruption figure of Dedie Rachim contributed significantly to the victory, even though the anti-corruption campaign was not carried out simultaneously. The formation of an anti-corruption political image is important because the community is tired of corruption cases that have ensnared regional heads.

Corresponding Author:

Dery Fitriadi Ginanjar,

Email: dery.fg@gmail.com

Department of communication,

Universitas Sali Al Aitaam,

Jl. Aceng Jl. Ciganitri, Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40287

1. PENDAHULUAN

Pencitraan politik tidak lepas dari komunikasi politik. Umumnya pencitraan jenis ini dilakukan secara persuasif yang bertujuan untuk memperluas jangkauan harapan antara kandidat dengan pemilih. Kontestan politik, baik dari figur populer atau yang sudah cukup lama dikenal publik atau pun baru berkecimpung, sama-sama menginginkan citra politik positif. Mereka yang memang punya basis sebagai orang bersih maupun bermasalah, tetap ingin terlihat sebagai citra bersih untuk mempengaruhi pemilih. Suka atau tidak, citra tersebut menjadi faktor paling menentukan sukses tidaknya figur dalam kontetasi politik.

Pada kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor 2018, muncul nama Dedie A Rachim yang digandeng petahana Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, bahkan akhirnya pasangan ini menjadi pemenang. Munculnya nama Dedie Rachim di luar prediksi pelaku politik, pengamat politik, dan rakyat Bogor. Sebelumnya Bima Arya sempat dipasang-pasangkan dengan sejumlah tokoh politik di Kota Hujan. Namun menjelang penetapan pasangan calon, tiba-tiba muncul nama Dedie A Rachim yang tidak pernah disebut-sebut sebelumnya.

Dedie yang terakhir kali menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendampingi Bima Arya Sugiarto pada Pilwalkot Bogor 2018. Figur Dedie diperkirakan muncul sebagai upaya untuk memunculkan kesan pemerintahan bersih di Kota Bogor. Ditambah pada saat bersamaan dengan penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2018, sejumlah kepala daerah banyak ditangkap KPK.

Kemunculan sosok Dedie setidaknya mampu mereduksi pemberitaan tentang korupsi yang pernah marak di Kota Bogor, mulai dari kepemimpinan Diani Budiarto sampai Bima Arya yang dikenal dengan istilah pleger terkait pembelian lahan Jambu Dua. Kehadiran Dedie Rachim menjadi sesuatu yang positif, melahirkan profil pemerintahan Kota Bogor yang bersih. Bima Arya pun sebagai wali kota tidak perlu lagi direpotkan oleh istilah pleger, atau tidak perlu lagi turun ke lapangan menangkap tangan orang yang diduga hendak melakukan praktik korupsi.

Dedie Rachim adalah satu-satunya petinggi setingkat direktur di KPK yang masuk serta berkarir pada pemerintahan daerah. Semenjak berdiri 2003 silam, belum pernah terdapat pejabat KPK yang mundur untuk terjun ke dunia politik. Mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ketika selesai menjabat. Begitu juga mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja yang menjadi tim sukses pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2018, mundur setelah menuntaskan jabatannya.

Sebelum menduduki kursi Wakil Wali Kota Bogor periode 2018-2023, Dedie menjalani pertarungan politik di Pilwalkot Bogor 2018. Bersama pasangannya yaitu Bima Arya, Dedie menjalani proses pendaftaran, kampanye, pemilihan, perhitungan suara, serta penetapan pemenang. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di 26 Juli 2018, menetapkan pasangan Bima Arya Sugiarto - Dedie A Rachim sebagai pemenang Pilwalkot Bogor 2018.

Pasangan no urut 3 Bima Arya serta Dedie A Rachim yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golkar, dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), meraup 215.708 suara dari 521.765 pengguna hak pilih atau 43,64 persen. Lalu di posisi kedua ditempati pasangan no urut 1, Achmad Ru'yat - Zaenul Muttaqin, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra, meraih 153.407 suara. Kemudian pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia usaha (PDIP) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dadang Danubrata - Sugeng Teguh Santoso, menempati urutan ketiga dengan raihan 63.335 suara. Lalu pasangan yang maju lewat jalur independen yaitu Edgar Suratman - Sefwelly Gynanjar meraih 61.871 suara.

Strategi pencitraan terhadap kandidat adalah tetap menciptakan kesan positif kepada publik (*create positive impression to the public*). Strategi pencitraan kandidat Eddy Rumpoko (ER) yang ditelitinya menunjukkan ada pesan kunci yaitu 'Menyapa Rakyat Mendekat Pada Rakyat'. Pesan kunci ini kemudian diimplementasikan dalam sebuah strategi pencitraan yang diturunkan ke dalam program komunikasi dan program relasi. Model pendekatan yang dilakukan oleh tim sukses dalam menjalankan setiap aksinya adalah menggunakan model pendekatan secara langsung yang disebut sebagai aksi *door to door*. Kemudian dalam melakukan implementasi strategi pencitraan kandidat Eddy Rumpoko, terdapat tahapan-tahapan dalam proses pencitraan yang juga dipahami sebagai tindakan strategis dalam upaya memenangkan Pilwalkot Batu 2012, yaitu dapat dilihat dari aspek keberadaan pemimpin politik, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan serta membangun konsensus. Sikap kebersamaan dan sikap solid yang dimiliki tim sukses yang menghadirkan pihak ketiga sebagai *third party endorser* yaitu tim kader dan tim relawan juga merupakan bagian penting dalam menjaring massa yang ikut mendukung kandidat ER dalam proses pemilukada di Kota Batu. Pada dasarnya tim sukses sebagai PR politik sudah memahami mengenai perencanaan sebuah strategi (Yudarwati 2017).

Pembentukan citra politik Dedie Rachim sebagai sosok antikorupsi pada Pilwalkot Bogor 2018 memiliki keuntungan karena Dedie tidak memiliki kasus negatif sebelumnya. Namun tentunya selama pencalonan hingga masa kampanye, pembentukan citra sebagai sosok antikorupsi harus tetap dilaksanakan karena publik Kota Bogor sudah sejatinya menginginkan pemerintah yang bersih dari segala aspek KKN (Setiadi 2000).

Pembentukan citra politik Dedie Rachim sebagai sosok antikorupsi sangat penting ketika yang bersangkutan menghadapi Pilwalkot Bogor 2018. Hal itu tidak sulit karena Dedie Rachim memiliki modal dasar dan modal sosial. Pemimpin yang mampu menjalankan langkah-langkah konstruksi sosial dirinya, akan memudahkan dia membangun *brand personal*.

Pencitraan sosok bersih antikorupsi itu pula yang secara tidak langsung dibentuk pasangan Bima Arya dan Dedie Rachim selama masa kampanye. Kampanye merupakan aktivitas persuasif yang diselenggarakan secara sadar, sengaja, bertahap, dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam praktek demokrasi electoral di Indonesia, fase kampanye kerap menjadi

titik krusial yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), terutama hubungannya dengan pendidikan politik warga masyarakat (Heryanto 2018).

Berangkat dari berbagai fenomena inilah yang menjadikan peneliti termotivasi untuk mengangkat masalah dengan fokus penelitian tentang pembentukan citra politik Dedie A Rachim sebagai sosok antikorupsi ketika menjadi peserta Pilwalkot Bogor 2018. Peneliti ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi di lapangan dilihat melalui rujukan kepada konsep dasar konstruksi sosial administrasi publik Berger-Luckmann yang menyebutkan proses sosial simultan dan berlapis-lapis melalui ILS-EOI.

Kehadiran sosok Dedie Rachim dalam perhelatan Pilwalkot Bogor 2018 lalu cukup menarik perhatian publik. Perjalanan karirnya di KPK menjadikan Dedie Rachim didaulat menjadi salah satu tokoh antikorupsi di Indonesia. Tak heran jika pada kampanye Pilwalkot Bogor 2018, pasangan Bima Arya-Dedie Rachim memiliki jualan program pemerintahan bersih dari praktek KKN. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul “Pembentukan Citra Politik Dedie Rachim Sebagai Sosok Antikorupsi - Studi Kasus Pada Pemilihan Wali Kota Bogor 2018”.

Pertanyaan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana tahapan pembentukan citra politik Dedie A Rachim sebagai sosok antikorupsi di Pilwalkot Bogor 2018? (2) Bagaimana kontribusi Dedie A Rachim sebagai sosok antikorupsi bagi kemenangan pasangan Bima Arya Sugiarto-Dedie A Rachim di Pilwalkot Bogor 2018? (3) Mengapa pembentukan citra politik antikorupsi penting dilakukan oleh Dedie A Rachim pada saat Pilwalkot Bogor 2018?.

Penelitian dilakukan di Kota Bogor, kemudian dilaksanakan selama 10 bulan, mulai bulan Agustus 2019 hingga bulan Juli 2020.

Keunikan dari kasus ini adalah sosok antikorupsi sangat diidam-idamkan masyarakat Indonesia di saat banyaknya fakta dan pemberitaan kepala daerah ditangkap KPK karena terjerat kasus KKN. Selain itu, Dedie Rachim menjadi pejabat KPK yang pertama terjun ke dalam politik praktis dan terjun di pilkada, tepatnya di Pilwalkot Bogor. Kemudian penelitian tentang pembentukan citra antikorupsi belum banyak ditemukan di khazanah keilmuan. Peneliti mengambil kasus pencitraan politik Dedie A Rachim ini, dengan menggunakan rujukan kepada konsep dasar konstruksi sosial administrasi publik Berger-Luckmann.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini didasarkan pada rumusan-rumusan penelitian yang muncul menuntut peneliti melakukan eksplorasi dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan menggunakan kata-kata tanpa harus menggunakan sebuah angka.

Penelitian kualitatif sering diasosiasikan keinginan peneliti untuk menelaah makna, konteks, dan suatu pendekatan holistik terhadap fenomena. Penelitian kualitatif dipahami bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) melibatkan banyak metode dalam menelaah permasalahan (Mulyana 2018).

Metode kualitatif sengaja digunakan oleh peneliti karena penelitian ini menelaah fenomena dalam suasana yang berlangsung secara alamiah, bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratoris. Di samping itu, metode kualitatif dipilih karena peneliti perlu melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dengan begitu, peneliti akan mendapatkan data yang utuh dari beberapa perilaku yang telah diamati dalam bentuk deskriptif.

Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono 2006).

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan studi kasus karena adanya relevansi atau kasus-kasus yang menarik untuk diteliti lebih lanjut antara lain:

1. Kasus korupsi di Indonesia banyak melibatkan kepala daerah. Di Jawa Barat tercatat ada 15 kepala daerah yang tertangkap OTT KPK. Begitu banyaknya kasus tersebut membuat masyarakat muak pada kasus KKN. Tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan pun dipastikan

terkikis. Kehadiran sosok antikorupsi menjadi pelipur dahaga pada pejabat yang bersih dari indikasi tindakan KKN. Dedie Rachim yang memiliki basis pekerjaan dari KPK memberikan citra pejabat yang bersih sehingga memberikan harapan menciptakan pemerintahan bersih di Kota Bogor.

2. Proses tahapan pembentukan citra antikorupsi yang akan mengikat kepada sosok Dedie Rachim menarik untuk ditelaah lebih dalam melalui sejumlah narasumber kompeten yang hadir ketika Dedie Rachim muncul sebagai Calon Wakil Wali Kota Bogor 2018-2023.
3. Upaya yang dilakukan Dedie Rachim dan tim kampanye pun harus didalami, misalnya mengetahui mekanisme pendekatan kepada masyarakat dalam upaya pembentukan citra antikorupsi yang ujungnya mendapatkan dukungan publik.

Peneliti ingin melakukan analisis lebih mendalam dengan mengumpulkan data tidak hanya yang berasal dari Dedie Rachim, tapi juga berdasarkan sudut pandang dari tim kampanye, para partai pengusung pasangan Bima Arya-Dedie Rachim, bahkan partai yang menjadi lawan politik Dedie Rachim saat Pilwalkot Bogor 2018. Sehingga pada akhirnya peneliti ingin menyoroti berbagai faktor yang mengatur komunikasi dalam situasi tertentu dan melukiskan keunikannya sekaligus dalam sebuah tulisan.

Sementara untuk paradigma, peneliti menggunakan konstruktivisme, yaitu aliran yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan kita sendiri. Pengetahuan merupakan hasil konstruksi kognitif dengan membuat struktur, kategori, konsep, skema, yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan. (Sambas, 2015)

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya yaitu, *ontology*, *epistemology*, dan metodologi. Level *ontology*, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. (Sugiyono 2018)

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang juga menjadi *key Informan*. Lalu narasumber pendukung adalah Tim Pemenangan pasangan Bima Arya-Dedie Rachim di Pilwalkot Bogor 2018, yaitu Ketua Tim Kampanye Pasangan Bima Arya-Dedie Rachim dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Tauhid Tagor, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor R. Dodi Setiawan, perwakilan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bogor Sendhy Pratama, S.H., M.H., Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor Safrudin Bima, perwakilan DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Bogor Devie Prihartini Sultani, S.E. Ditambah perwakilan dari partai lawan politik Bima Arya Sugiarto Sugiarto-Dedie A Rachim di Pilwalkot Bogor 2018, yaitu Sekretaris Umum DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bogor Atty Somaddikarya, Sekretaris Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor H. Karnain Asyhar, S.P., M.Si., DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor Ahmad Aswandi, S.H.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Bogor, Sekretariat Pemenangan Pasangan Bima Arya - Dedie A Rachim, kantor partai politik pengusung Bima Arya-Dedie Rachim, dan DPRD Kota Bogor. Peneliti mengambil tempat di Kota Bogor karena subjek penelitian melakukan aktivitas di Kota Bogor.

Waktu penelitian dimulai dengan pra penelitian pada bulan Agustus 2019, setelah itu peneliti mulai mengolah data pada pertengahan November 2019. Serta penelitian lapangan mulai Desember 2019 sampai Juli 2020.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan, gambar-gambar mengenai pembentukan citra politik kepada Dedie Rachim sehingga menjadi seorang sosok antikorupsi.

3. PEMBAHASAN

Terkait KKN di Indonesia, kasus ini seakan tidak pernah habis. Padahal para pelaku sudah banyak yang dijebloskan ke dalam penjara oleh aparat penegak hukum. Hukumannya pun tak main-main, bervariasi, rata-rata di atas 5 tahun penjara, bahkan tak sedikit pula yang hartanya disita oleh negara. Ironisnya, perilaku tersebut seolah tumbuh terus dengan berbagai macam modus dan selalu menghantui kehidupan masyarakat (Bhairawa Putera 2012).

Tingginya angka korupsi berbanding lurus terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kondisi sosial ini perlu dibenahi melalui

tatanan hukum yang komprehensif. Korupsi merupakan tindakan luar biasa dan perlu tindakan luar biasa, tetapi realita di lapangan masih membuktikan angka OTT masih banyak. Rakyat membutuhkan model utama yang bisa memulihkan kepercayaan kepada penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Ironisnya para pelaku KKN banyak dilakukan oleh kepala daerah. Para kepala daerah yang terjerat kasus KKN, mulai tingkat gubernur, bupati, atau wali kota. Mayoritas KKN dilakukan dalam bentuk kerugian keuangan negara, dengan penyebab utama tindak korupsi ini dikarenakan biaya politik tinggi dan pemanfaatan celah dalam regulasi.

Modus utama dan paling sering dilakukan pejabat daerah dalam tindak pidana korupsi adalah *mark up* pengadaan barang dan jasa, membuat pengeluaran fiktif, dan proyek-proyek untuk keuntungan sendiri. Tumbuh suburanya korupsi di daerah, termasuk di Jawa Barat, tidak terlepas dari persoalan sistem, baik pemerintahan, politik, maupun sistem hukum. Persoalan sistem pemerintahan terkait dengan peran eksekutif dan legislatif daerah khususnya dalam penganggaran yang tidak profesional, banyak permainan, dan cenderung tertutup. Pola rekrutmen anggota legislatif pun menjadi persoalan karena adanya kewajiban-kewajiban tidak tertulis yang cukup memberatkan sehingga mendorong mereka untuk mencari tambahan-tambahan lain ketika sudah duduk di lembaga legislatif. Harapan pada lembaga penegak hukum pun seolah sulit karena mereka menghadapi kendala tersendiri dalam mengungkap kasus korupsi yang khusus melibatkan pejabat publik (Dinasti et al. 2017).

Di Jawa Barat, hingga Oktober 2019, terdapat 15 kepala daerah yang sudah ditangkap KPK. Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pertama yang kepala daerahnya paling banyak terjerat kasus korupsi di KPK. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 14 kepala daerah menjadi tersangka di KPK dan posisi ketiga diisi oleh Sumatera Utara (Sumut) dengan jumlah 12 kepala daerah. Data tersebut merupakan hasil pantauan ICW sejak KPK berdiri, dari 2004 hingga 2018 (satu kasus adalah fakta terbaru penangkapan Bupati Indramayu Supendi pada Oktober 2019).

Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada politisi, diperlukan komunikasi politik yang baik dan cermat. Fenomena komunikasi politik suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik di mana komunikasi itu bekerja. Terdapat dua fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dikaji, yaitu: Pertama, fenomena komunikasi politik dalam sistem politik, di mana pihak elit yang berada di ranah suprastruktur politik yaitu eksekutif dan legislatif memiliki fungsi untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi dan kepentingan yang nantinya dinegosiasikan (diperjuangkan) menjadi produk kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut akan diumpun balik ke pihak publik di ranah infrastruktur politik yang terhimpun dalam kesatuan kekuatan massa seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau nongovernmental organizations (NGOs), partai politik, organisasi massa (ormas), media massa, dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan (Muhtadi 2008).

Mengenai komunikasi politik (*political communication*), Kantaprawira memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah (Kantaprawira 2004).

Dalam kampanye politik, pembentukan citra politik tetap diperlukan meskipun melakukan berbagai pembaharuan teknik, misalnya sosok antikorupsi. Seperti disampaikan Ketua Tim Pemenangan Kampanye Bima Arya Sugiarto-Dedie A Rachim (Badra), Tauhid Tagor, bahwa isu antikorupsi masih relevan digaungkan pada setiap gelaran pilkada atau pileg. Perlu disadari, biaya kampanye sangat tinggi, apalagi masyarakat banyak yang sudah berbicara soal keuntungan sesaat bagi mereka ketika masa kampanye. Artinya pilkada atau pileg itu sudah berbicara investasi. Tauhid menyoroti usai pelaksanaan kampanye politik tersebut. Peralannya ketika semua bicara soal antikorupsi pada saat kampanye, tetapi realitasnya banyak politisi ditangkap karena kasus korupsi. Kota Bogor beruntung menasbihkan diri menjadi Kota Ramah Keluarga. Peralannya ketika semua hak terpenuhi dari keluarga, orang tidak akan lagi meminta lebih, misalnya melakukan korupsi.

Pencitraan tidak selalu seiring sejalan dengan kenyataan perilaku yang sesungguhnya. Citra individu dibentuk sedemikian rupa untuk mempengaruhi persepsi individu yang lain. Dalam politik, perilaku yang diperlihatkan seorang calon terhadap masyarakat, belum tentu sama dengan karakter dan kepribadiannya. Politik mampu mengubah perilaku seseorang dari yang biasa menjadi luar biasa, dari normal menjadi abnormal. Sering kita temui perilaku seorang politisi tampak seperti ada dorongan (paksaan) yang berlawanan dari yang sesungguhnya. Senyum yang terpaksa, memuji yang terlalu tulus, begitu perhatian, dan perilaku baik tanpa sebab. Hal ini pasti

menimbulkan banyak pertanyaan yang kadang mampu terjawab berdasarkan pengalaman yang sudah- sudah (Dachrud and Soleman 2015).

Hal sama dikatakan lawan politik Dedie A Rachim, salah satunya Atty Somadikarya dari PDIP. Menurutnya, sosok antikorupsi bisa jadi *role model* untuk pileg dan pilkada merupakan hal yang wajar, tetapi kalau penegak hukum berlatar belakang KPK, jaksa, hakim, dan sebagainya masuk dalam kancah politik dengan isu tersebut, maka habis semua politisi. Meskipun DPR itu harus memiliki latar belakang berbeda, tetapi harus ada peran masing-masing sesuai keahliannya.

Dedie Rachim sebagai sosok atau figur antikorupsi di Kota Bogor diharapkan memberikan pembuktian selama periode kepemimpinannya yang bermanfaat bagi Kota Bogor. Misalnya uang APBD dimaksimalkan dan PAD tidak ada kebocoran, lalu memiliki komunikasi dengan provinsi, pusat, anggaran, supaya dana-dana bisa turun ke Bogor.

Pada Pilwalkot Bogor 2018, kehadiran Dedie Rachim di luar prediksi banyak pihak. Dengan latar belakang pejabat KPK, Dedie yang digandeng petahana Bima Arya Sugiarto ini membawa semangat antikorupsi di Kota Bogor. Melalui dukungan koalisi parpol Golkar, PAN, Demokrat, Hanura, dan Nasdem, Dedie membawa sejarah baru sebagai orang KPK yang maju dalam dunia politik praktis, khususnya pilkada.

Dedie Rachim mengundurkan diri dari KPK pada 27 Desember 2017 setelah mendapat persetujuan dari pimpinan KPK saat itu yakni Agus Rahardjo. Dalam perjalanannya, Dedie Rachim memiliki modal dasar dan modal sosial ketika menjalankan langkah-langkah konstruksi sosial, memudahkan dirinya membangun *brand personal*.

Setelah ditetapkan KPUD Kota Bogor sebagai Calon Wakil Wali Kota Bogor 2018-2023, Dedie melakukan sosialisasi kepada masyarakat Bogor. Meskipun tidak terlalu digembar-gemborkan, latar belakang dirinya sebagai mantan pejabat KPK cukup membantu mendongkrak popularitas namanya.

“Sebetulnya saya tidak berpikir sejauh itu, saya di KPK berkarir dan *passion* ingin membangun bangsa dan negara yang antikorupsi. Bahwa itu (latar belakang KPK) memiliki nilai jual, hal itu bukan tujuan saya. Tetapi dalam praktiknya, tentu latar belakang KPK saya memberikan semacam penguatan bahwa memang masyarakat menginginkan ada alternatif pimpinan yang punya background, reputasi, dan juga latar belakang bersih. Saya pikir KPK itu lembaga yang identik dengan bersih, transparan, akuntabel.” (Wawancara Jumat tanggal 27 Desember 2019 dengan Dedie A Rachim).

Membentuk suatu citra politik dalam perhelatan pemilihan kepala daerah menjadi hal sangat penting saat ini, terutama akan semakin banyak bermunculan individu dengan keahlian yang sama, Pembentukan citra ini dapat membantu seseorang untuk memperkenalkan keahlian pribadi dan membuatnya lebih menonjol di antara yang lainnya (Dachrud and Soleman 2015).

Selain itu, membantu seorang dalam meningkatkan nilai jual pribadi akan keahlian yang dimilikinya di mata masyarakat luas. Pembentukan citra pun membantu seseorang dalam membentuk koneksi dengan banyak orang yang memiliki ketertarikan yang sama akan sesuatu, hal tersebut dapat memunculkan kemudahan untuk prospek karir yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Kemudian dapat membentuk suatu standar diri dari seorang tersebut, standar diri tersebut dapat menjadi bahan acuan untuk lebih berkembang di kemudian hari akan keahlian yang dimiliki serta profesi yang digeluti.

Seperti yang disampaikan Sendhy Pratama dari Partai Hanura yang sempat mempertanyakan integritas Dedie Rachim, termasuk idealisme memerangi korupsi yang tetap berjalan, konsisten, karena politik itu dinamis. Partai Hanura mempertanyakan kemampuan Dedie mengkoordinisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk komitmen pada semangat antikorupsi. Palsunya untuk menghancurkan korupsi itu adalah integritas pimpinan. Ternyata Partai Hanura mendapatkan jawaban memuaskan dari Dedie Rachim yang menjamin komitmen antikorupsi adalah panggilan hati, bukan intervensi politik.

Lawan politik pun mengakui citra politik Dedie Rachim sebagai sosok antikorupsi mendukung kemenangan pasangan Bima Arya-Dedie Rachim pada Pilwalkot Bogor 2018. Atty Somadikarya dari PDIP menjelaskan bahwa Bima Arya diuntungkan oleh sosok Dedie Rachim karena pada saat itu masyarakat sedang krisis kepercayaan setelah munculnya berbagai kasus korupsi, dimulai dari lembaga eksekutif, legislatif, bahkan penegak hukum sendiri. Artinya pada saat arena pilkada dimulai, pasti rakyat membutuhkan figur yang amat bersih. Pada Pilwalkot Bogor 2018, lahir seorang mantan KPK yang berujung pada kemenangan sehingga makin menunjukkan tren

kepercayaan masyarakat akan meningkat pada sosok bersih dan akan memilih seseorang yang dianggap bersih.

Berdasarkan pemahaman mengenai pembentukan persepsi atau pencitraan, maka seringkali pembentukan citra lebih bersifat subjektif dan tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, banyak organisasi kemudian tidak cukup menjalankan program komunikasinya untuk pembentukan citra, melainkan lebih kepada pembentukan reputasi organisasi (Dachrud and Soleman 2015).

Kontribusi Dedie Rachim dalam Pilwalkot Bogor 2018 tidak perlu diekspose berlebihan, meskipun saat itu pasangannya Bima Arya sedang tersandung kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Angkahong. Ternyata latar belakang pekerjaan Dedie yang berasal dari lembaga antirasuah telah membentuk dirinya sebagai sosok antikorupsi. Masyarakat percaya Dedie memiliki komitmen dan semangat yang sama dengan kantor sebelumnya dalam pemberantasan korupsi, yaitu KPK.

Devie Prihartini Sultani menyebutkan spirit antikorupsi yang dibawa Dedie A Rachim cukup tinggi. Terlebih Dedie merupakan salah satu mantan petinggi KPK sehingga harapan pemberantasan korupsi, khususnya pencegahan, terjadi di Kota Bogor dan bisa terlaksana secara baik.

Atty Somadikarya meyakini kontribusi Dedie saat kampanye Pilwalkot Bogor 2018 sangat besar. Bahkan kemenangan pasangan Bima Arya-Dedie Rachim banyak disumbangkan oleh figur Dedie. Pasalnya kepemimpinan Bima Arya sudah dalam posisi titik jenuh yang terlalu banyak pencitraan, tidak memikirkan tata desa di pinggiran perbatasan atau memilih memuat pencitraan dengan merias tata kota di lingkup pusat kota. Hal ini terbukti oleh capaian suara pasangan Badra yang notabene petahanan, tetapi hanya meraih angka 32 persen. Sebetulnya capaian tersebut menunjukkan kekalahan secara psikis yang semestinya petahana bisa meraih di atas 60 persen. Kondisi tersebut menunjukkan Bima membutuhkan Dedie Rachim yang harus diberikan apresiasi berupa komitmen estafet kepemimpinan pada pilkada Kota Bogor 2024.

Sebagai bagian dari persuasi, pencitraan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari yang paling sederhana/tradisional hingga yang paling moderen. Pencitraan yang positif akan berpengaruh positif pula terhadap sikap, kepercayaan dan tingkah laku orang yang dipersuasi, begitu pun sebaliknya. Pencitraan dalam komunikasi politik sangat tergantung dengan usaha-usaha persuasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh persuader terhadap the persuadee. Pada konteks inilah, dibutuhkan manajemen pencitraan atau satu penataan dan pengelolaan terhadap suatu kegiatan yang mempunyai dampak positif (baik) terhadap nama baik (pencitraan) individu maupun kelompok (organisasi, partai dan lain-lain) (Kamaruddin, 2009).

Ahmad Aswandi menilai Dedie Rachim merupakan orang baru dalam kancah politik Kota Bogor. Selama ini publik hanya mengetahui Dedie Rachim adalah pejabat KPK, sehingga begitu masuk dunia politik membuatnya memiliki citra sosok antikorupsi. Dedie Rachim mampu melengkapi Bima dari sisi gesekan kepentingan. Sebagai orang nonpartai, Dedie memiliki pola kerja yang bersih. Peran Dedie dengan latar belakang KPK akan berefek pada pembentukan pola pembangunan Kota Bogor yang bersih dan antikorupsi.

Karnaen Azhar menyebutkan, figur Dedie Rachim memperkuat posisi Bima Arya yang popularitasnya relatif tertinggi dibandingkan calon lain. Bima Arya yang mendapat serangan isu korupsi, dipasangkan dengan figur antikorupsi, sehingga cocok untuk menghalau isu negatif dari isu-isu korupsi.

Pencitraan merupakan salah satu bentuk penanaman ideologi, perpektif ke dalam benak orang lain, dalam kontek politik pencitraan kemudian lebih melihat pada bagaimana menampilkan citra diri yang baik bagi masyarakat (Hendrastomo 2009).

Politik pencitraan kemudian banyak digunakan dalam berbagai kampanye politik. Kehadirannya boleh jadi bersamaan dengan kemunculan dunia politik itu sendiri. Bahkan, sejarah politik Roma mencatat tentang pengaruh pencitraan politik dengan modal rangkaian kata yang terus diucapkan saat kampanye mampu menggiring opini masyarakat dalam memilih.

Dedie Rachim mengakui pembentukan citra politik sosok antikorupsi pada kondisi sekarang masih diperlukan. Hampir semua masyarakat menginginkan pemerintahnya bersih, mampu menjembatani dan mewujudkan mimpi tersebut.

Di negara-negara yang mengedepankan budaya politik mencari kekuasaan, politik pencitraan sangat penting. Persaingan politik bebas atau demokrasi, semakin menguatkan pentingnya pencitraan politik. Menurut Anwar Arifin, bahwa dalam konteks perpolitikan di Indonesia, pencitraan politik semakin menguat, ketika Indonesia menerapkan sistem pemilu

langsung berdasarkan suara terbanyak. Janji politik yang dikemas dengan berbagai bentuk dan disebarkan melalui media massa merupakan salah satu bentuk pencitraan politik (Arifin 2003).

Sementara itu, Syafrudin Bima dari PAN menyebutkan, semangat antikorupsi pada kampanye politik tidak bisa ditenggelamkan, malah harus menguat, seperti yang dilakukan Dedie Rachim. Beruntung pada pilwalkot Bogor 2018, sosok antikorupsi sudah melekat dalam figur Dedie.

Lawan politik Dedie A Rachim, di antaranya Atty Somadikarya menyatakan, sosok antikorupsi bisa jadi *role model* untuk pileg dan pilkada merupakan hal wajar. Dedie Rachim sebagai sosok atau figur antikorupsi di Kota Bogor diharapkan memberikan pembuktian selama periode kepemimpinannya bagi Kota Bogor.

Citra membantu seseorang dalam memahami, menilai, dan mengidentifikasi peristiwa, gagasan, tujuan, atau pemimpin politik. Dan Nimmo mengungkapkan, citra membantu memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya, tentang preferensi politik, dan tentang penghubungan dengan orang lain. Kegiatan pencitraan dalam kegiatan politik disebut dengan politik pencitraan (*imaging politic*) (Nimmo 2010).

4. KESIMPULAN

Komunikasi politik berupa pembentukan citra politik pada Dedie A Rachim memiliki beberapa komponen sehingga dapat tampil sebagai sosok antikorupsi. Dari pembahasan di atas, ditarik kesimpulan yaitu:

1. Proses tahapan pembentukan citra politik sebagai sosok antikorupsi terhadap Dedie A Rachim pada Pilwalkot Bogr 2018 berjalan baik, Tim Pemenangan Pasangan Bima Arya Sugarto-Dedie Rachim memanfaatkan latar belakang Dedie Rachim yang berasal dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meraih simpati masyarakat pemilih Kota Bogor dalam kampanye Pilwalkot Kota Bogor 2018 lalu. Tahapan yang dilalui berawal saat Dedie Rachim menerima pinangan Bima Arya untuk menjadi Bakal Calon Wakil Wali Kota Bogor, dilanjutkan melalui proses pengunduran diri dari jabatan di KPK, mendapat dukungan dari partai politik, pendaftaran pasangan ke KPU Kota Bogor, melaksanakan kampanye Pilwalkot Bogor, menjadi pemenang Pilwalkot Bogor 2018.
2. Sosok Antikorupsi pada Dedie Rachim memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan pasangan Bima Arya Sugiarto - Dedie Rachim di Pilwalkot Bogor 2018. Meskipun kampanye antikorupsi tidak dilakukan secara simultan, tetapi menjadi signifikan karena pada saat itu, Bima Arya sedang tersangkut masalah kasus pleger, sehingga isu antikorupsi terkalibrasi karena pasangannya Dedie Rachim merupakan sosok antikorupsi.
3. Pembentukan citra politik antikorupsi penting dilakukan oleh Dedie A Rachim pada saat Pilwalkot Bogor 2018 karena pada saat itu masyarakat sudah jenuh pada kasus korupsi yang menjerat banyak kepala daerah. Di Jawa Barat sendiri sudah banyak kepala daerah yang bermasalah dengan kasus korupsi. Artinya isu ini masih cukup relevan dikembangkan di masyarakat, tetapi dengan varian isu pemberantasan dan paling penting adalah upaya pencegahan, salah satunya melalui fakta integritas aparatur pemerintah.

Saran Bagi Dedie A. Rachim

1. Selama proses tahapan pembentukan citra politik antikorupsi, Dedie A Rachim harus menggambarkan citra dirinya yang memang komitmen menjaga marwah KPK sebagai lembaga antikorupsi. Selama kampanye Pilwalkot Bogor 2018, Dedie A Rachim tidak terlalu menonjolkan hal tersebut, tetapi menyerahkan pada perjalanan politiknya. Beruntung masyarakat Kota Bogor memahami betul jika Dedie Rachim memang bersih dan kompeten pada isu antikorupsi.
2. Dedie Rachim harus lebih bisa menciptakan dirinya sebagai sosok antikorupsi pada Pilwalkot Bogor 2018. Momentum tersebut sangat tepat karena masyarakat Kota Bogor membutuhkan sosok yang bersih untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai harapan.
3. Pembentukan citra politik antikorupsi masih penting dilakukan pada kampanye politik, salah satunya Pilwalkot Bogor 2018. Terlebih saat ini semakin banyak yang menaruh perhatian terhadap penyebab, efek serta cara membasmi dan mencegah korupsi, yang kemudian menjadi isu penting dalam skala nasional maupun internasional.

Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian sejenis yang meneliti tentang komunikasi politik, terutama mengenai pembentukan citra politik sebagai objek penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama agar dapat menemukan permasalahan yang lain yang tidak dapat ditemukan dalam penelitian ini.
2. Bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa komunikasi politik, agar lebih memahami pembentukan citra politik yang digunakan dalam event politik, seperti pilkada atau pileg.
3. Sebelum penelitian dimulai, seharusnya kita mengenal atau bahkan melakukan observasi ke lembaga/instansi/perusahaan yang akan dijadikan tempat penelitian, sehingga penelitian kita lebih mudah dilaksanakan.
4. Kasus korupsi ini telah mencederai keadilan bagi seluruh rakyat sehingga harus segera dimusnahkan melalui komitmen kuat dari penyelenggara negara. Dikhawatirkan korupsi ini menjadi turun menurun kepada generasi berikut.
5. Isu korupsi masih layak diteliti selama terus menggerogoti sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu melalui penelitian yang lebih tajam.

5. REFERENCES

- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bhairawa Putera, Prakoso. 2012. "Korupsi di Daerah: Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah." *Jurnal Borneo Administrator* 8(2): 161-79.
- Dachrud, Musdalifah, and Aris Soleman. 2015. "Memahami Pencitraan Politik Melalui Pendekatan Mekanisme Pertahanan Diri." *POTRET PEMIKIRAN - Vol. 19, No. 2, Juli - Desember 2015* 19.
- Dinasti, Politik et al. 2017. "Pilkada, Politik Dinasti, Dan Korupsi." (1983): 30-49.
- Hendrastomo, Grendi. 2009. "Demokrasi Dan Politik Pencitraan Demokrasi Dan Politik Pencitraan Perang Iklan Politik Menuju Demokratisasi Di Indonesia Grendi Hendrastomo 1." *Dimensia* 3(2): 1-14.
- Heryanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD. "Kamaruddin - Komunikasi Politik Dan Pencitraan -Hal-22-43 Jurnal."
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia - Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Kampanye Politik*. Bandung: Humaniora.
- Mulyana, Deddy. 2018. *Metodologi Penelitian*. 9th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik: Khalayak Dan Efek*. Bandung: Rosda.
- Sambas, Syukriadi. 2015. *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiadi, Edi. 2000. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government." *Mimbar No. 4 Th.XVI Okt. - Des. 2000 - 305 (4)*: 305-33.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yudarwati, Renny Lia Yahono / Gregoria Arum. 2017. "Strategi Pencitraan Kandidat Eddy Rumpoko Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu."